

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Komunikasi merupakan dasar terbentuknya peradaban manusia karena melalui proses komunikasi, nilai, pengetahuan, dan budaya dapat diwariskan serta dipahami bersama. Lebih dari sekadar pertukaran pesan, komunikasi juga menjadi realitas sosial itu sendiri, di mana makna dan tatanan kehidupan dibangun melalui interaksi antarmanusia. Sehingga, komunikasi tidak hanya mendukung keberlangsungan masyarakat, tetapi juga menciptakan realitas yang membentuk peradaban manusia.

Carl I. Hovland (dalam Hariyanto, 2021: 21), mendefinisikan komunikasi sebagai proses di mana seorang individu (komunikator) menggunakan simbol bahasa untuk mengekspresikan dorongan guna memengaruhi perilaku individu lain (penerima komunikasi). Ini menunjukkan bahwa komunikasi sangat penting bagi keberadaan manusia karena memungkinkan orang untuk mengekspresikan perasaan, ide, dan keinginan mereka satu sama lain.

Tanpa komunikasi, manusia akan kesulitan membangun hubungan sosial, bekerja sama, maupun memahami lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, komunikasi menjadi fondasi utama dalam pembentukan interaksi sosial dan perkembangan peradaban manusia. Komunikasi terjadi dalam berbagai konteks yang mencerminkan keragaman interaksi manusia.

Dalam konteks intrapersonal, seseorang berkomunikasi dengan dirinya sendiri melalui proses berpikir dan refleksi. Interpersonal terjadi saat dua orang atau lebih saling bertukar makna, sedangkan kelompok dan organisasi melibatkan koordinasi untuk mencapai tujuan bersama. Komunikasi massa menyebarkan pesan ke publik melalui media, dan komunikasi budaya dipengaruhi oleh nilai serta norma masyarakat. Oleh karena itu, komunikasi tidak hanya menjadi sarana pertukaran makna antarmanusia, tetapi juga fondasi penting dalam menjaga keteraturan dan efektivitas suatu sistem sosial. Salah satu bentuknya yang paling nyata terlihat dalam komunikasi organisasi, di mana proses penyampaian informasi, koordinasi, dan pengambilan keputusan dilakukan secara terstruktur untuk mencapai tujuan bersama.

Menurut Goldhaber (dalam Wahyudhi et al., 2020:44) komunikasi organisasi adalah aliran pesan-pesan dalam jaringan dari hubungan-hubungan yang interdependen. Artinya, setiap individu dalam organisasi memiliki peran dan tanggungjawab yang saling terhubung melalui proses komunikasi. Dalam konteks ini, komunikasi tidak hanya menjadi sarana penyampaian informasi, tetapi juga berfungsi untuk membangun koordinasi, memperkuat kerja sama, dan menciptakan pemahaman bersama di antara anggota organisasi. Melalui jaringan komunikasi yang teratur, organisasi dapat beroperasi secara efektif karena setiap pesan yang disampaikan membantu mengarahkan tindakan individu menuju tujuan bersama. Dengan demikian, komunikasi organisasi menjadi fondasi utama dalam menjaga keseimbangan sistem kerja dan memastikan seluruh elemen organisasi bergerak secara harmonis.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) daring menyebut krisis sebagai keadaan yang berbahaya; genting; keadaan suram, baik secara ekonomi, moral, ataupun lainnya. Dalam meneliti komunikasi krisis, peneliti perlu menetapkan definisi krisis yang dimaksud. Sebagian besar definisi secara eksplisit menyebut krisis terfokus pada organisasi dan didefinisikan sebagai peristiwa yang spesifik, tidak terduga, dan menciptakan ketidakpastian yang tinggi yang memiliki potensi menghancurkan organisasi.

Pearson (dalam Rofiki Rahman & Astriani, 2023: 93) mengatakan bahwa krisis merupakan kejadian berprobabilitas rendah tetapi berdampak besar yang mengancam keberadaan organisasi. Sebab, akibat, dan cara penyelesaian krisis biasanya tidak jelas, dan terdapat keyakinan bahwa keputusan harus dibuat dengan segera. Krisis melibatkan stakeholders, seperti customers, karyawan, dan investor. Dalam situasi ini, organisasi perlu menguraikan siapa yang bertanggung jawab atas krisis dan bagaimana krisis tersebut mempengaruhi hubungan dalam organisasi.

Proses rutin suatu organisasi terhenti selama krisis, sehingga organisasi tersebut tidak dapat berjalan dengan lancar. Hal ini disebabkan oleh berbagai keadaan dan situasi yang dihadapi organisasi, yang menghasilkan perubahan yang tidak direncanakan. Masalah seperti itu bahkan dapat berdampak lebih buruk pada bisnis jika tidak ditangani secara efisien dan efektif.

Krisis komunikasi merupakan salah satu aspek krusial dalam manajemen organisasi, terutama ketika lembaga menghadapi situasi yang berpotensi mengancam

stabilitas, reputasi, serta kepercayaan publik. Krisis dapat muncul secara tiba-tiba akibat faktor internal maupun eksternal, dan jika tidak ditangani dengan tepat, dapat menimbulkan dampak negatif yang berkepanjangan. Oleh karena itu, setiap organisasi, termasuk institusi pemerintah dan penegak hukum, dituntut memiliki kemampuan komunikasi krisis yang responsif, transparan, dan strategis.

Setiap bisnis, lembaga, organisasi, atau institusi dapat mengalami krisis. Ini termasuk kepolisian, yang rentan terhadap guncangan dari dalam maupun luar. Kesalahan atau pelanggaran hukum oleh petugas kepolisian, seperti tindakan tidak bermoral, agresi, penggunaan narkoba, penyalahgunaan jabatan, dan masalah lainnya, berpotensi menjadi bumerang.

Institusi kepolisian sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat tidak terlepas dari potensi krisis komunikasi. Krisis dapat muncul ketika terjadi peristiwa yang memunculkan persepsi negatif publik terhadap kinerja kepolisian, seperti insiden penyalahgunaan wewenang, kesalahan prosedur, atau situasi sosial-politik yang memicu demonstrasi massa. Salah satu contohnya adalah aksi unjuk rasa mahasiswa di depan Gedung DPRD Nusa Tenggara Timur yang menentang kebijakan kenaikan tunjangan DPR. Situasi ini menjadi ujian bagi citra dan kredibilitas kepolisian, karena setiap tindakan aparat dalam mengelola massa berpotensi memengaruhi opini publik terhadap institusi.

Menurut Abraham Lincoln (dalam Rahman, 2022) Demokrasi diperintah oleh, untuk, dan atas nama warganya. Ini menyiratkan bahwa setiap warga negara memiliki

hak yang sama untuk membuat keputusan yang mengatur kehidupan. Demokrasi memungkinkan warga negara untuk berpartisipasi dalam pembuatan undang-undang baik secara langsung maupun melalui perwakilan. Kata Yunani demokrasi berasal dari etimologi kata *demos* (rakyat) dan *cratein* atau *cratos* (kekuasaan dan kedaulatan). Kata demokrasi, yang umumnya dipahami sebagai "pemerintahan rakyat," dibentuk dengan menggabungkan kata *demos* dan *cratos*. Rakyat memegang kedaulatan tertinggi, yang mereka jalankan baik secara langsung maupun melalui perwakilan mereka dalam proses pemilihan yang berkelanjutan. Sistem demokrasi ini memprioritaskan kedaulatan absolut di atas kehendak rakyat, oleh karena itu keinginan rakyat harus memandu keputusan pemerintah tentang arah negara.

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang menegaskan bahwa seluruh kehidupan bernegara harus berlandaskan pada hukum guna menjamin keadilan bagi seluruh warga negara. Konstitusi juga memberikan kebebasan bagi masyarakat untuk berkumpul dan menyampaikan pendapat, baik secara lisan maupun tulisan. Salah satu wujud nyata kebebasan tersebut adalah melalui aksi demonstrasi sebagai bentuk penyampaian aspirasi publik dalam sistem demokrasi. Dalam konteks ini, masyarakat terutama mahasiswa memiliki peran penting sebagai penggerak kritik terhadap kebijakan pemerintah dan penjaga nilai-nilai demokrasi. Demonstrasi biasanya terjadi sebagai respons terhadap berbagai kebijakan yang dianggap merugikan demokrasi Indonesia dan tidak sesuai dengan kepentingan rakyat. (Bunajar & Wardhani, 2023).

Aksi protes mahasiswa yang meluas pada awal tahun 2025 mengekspresikan ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah, terutama penulisan ulang Undang-Undang Angkatan Bersenjata Nasional Indonesia dan kenaikan PPN dari 11% menjadi 12%. Masyarakat berpenghasilan rendah merasa terbebani oleh kenaikan PPN, dan kekhawatiran tentang kemunduran demokrasi muncul akibat meningkatnya pengaruh militer dalam pemerintahan sipil. Badan Eksekutif Mahasiswa Indonesia (BEM SI) memimpin inisiatif ini sebagai respons terhadap meningkatnya kritik publik terhadap akuntabilitas demokrasi, keadilan sosial, dan tata kelola pemerintahan Indonesia.

Aktivisme mahasiswa secara historis memainkan peran penting dalam membentuk arah politik Indonesia, mulai dari gerakan anti-Suharto pada tahun 1998 hingga protes baru-baru ini terhadap undang-undang ketenagakerjaan yang regresif. Namun, demonstrasi tahun 2025 menandakan pergeseran fokus ke arah persimpangan Krisis ekonomi dan kelembagaan. Kebijakan fiskal pemerintahan Prabowo, termasuk pemotongan anggaran yang signifikan untuk program pendidikan dan kesejahteraan sosial, telah memperburuk keluhan publik. Kenaikan PPN semakin membebani keuangan rumah tangga di tengah meningkatnya inflasi (Savandha, Septien Azzahra, 2025).

Pada 25 Agustus 2025, gelombang protes yang sebelumnya mereda kembali meningkat, menandai tahap ketiga dari serangkaian protes nasional yang menyimpang dari pola tersebut. Selain menentang kenaikan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, tuntutan mahasiswa dan masyarakat pada saat itu juga menyoroti sejumlah

undang-undang kontroversial, termasuk Undang-Undang TNI dan Undang-Undang Penyitaan Aset, yang dianggap berpotensi merusak demokrasi dan membahayakan gagasan kedaulatan rakyat. Selain itu, terdapat kritik terhadap kenaikan besar Pajak Tanah dan Bangunan untuk Sektor Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2), khususnya setelah kebijakan serupa sebelumnya memicu protes di sejumlah daerah, termasuk Nusa Tenggara Timur.

Dilansir dari *news.detik.com* pada 1 September 2025, situasi politik di NTT memanas ketika ratusan mahasiswa dari aliansi Cipayung Plus, BEM, dan organisasi pemuda menggelar aksi di depan Gedung DPRD NTT menolak kenaikan tunjangan DPR. Aksi yang diawali dengan longmarch dari GOR Oepoi menuju Jalan El Tari ini diwarnai orasi, pembakaran ban, dan ancaman mendobrak gedung jika tuntutan tidak dipenuhi. Mahasiswa menyampaikan 11 tuntutan utama, antara lain pengesahan RUU Perampasan Aset dan RUU Masyarakat Adat, penghentian tindakan represif aparat, pembebasan tahanan demonstrasi, pencopotan Kapolri, serta penghapusan tunjangan DPR yang dinilai berlebihan di tengah kesulitan rakyat.

Eskalasi demonstrasi di Kupang dipicu oleh dua faktor utama: struktural dan institusional. Secara struktural, ketimpangan ekonomi dan rendahnya kepercayaan publik terhadap elite politik menjadi sumber ketegangan, terutama setelah DPR RI menyetujui kenaikan tunjangan melalui RUU APBN 2025 yang dinilai memberatkan rakyat, khususnya di daerah miskin seperti NTT. Secara institusional, kurangnya koordinasi antara Polresta Kupang Kota dan DPRD NTT dalam komunikasi pra-

demonstrasi menimbulkan kesan ketidakpedulian pejabat, sehingga memperburuk situasi dan memicu ancaman massa untuk mendobrak gedung DPRD.

Urgensi penelitian ini terletak pada potensi dampak jangka panjang kegagalan komunikasi krisis terhadap stabilitas demokrasi Indonesia. Demonstrasi 2025 telah menunjukkan pola nasional di mana 36.117 pemberitaan media mencakup kekerasan aparat dan penahanan massal, yang merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara. Di NTT, di mana konflik sosial sering kali terkait isu lokal seperti kemiskinan dan TPPO, dilihat dari kasus yang di tangani oleh Polresta Kupang Kota dapat memberikan wawasan empiris tentang model penanganan yang efektif, seperti dialog langsung yang berhasil meredakan aksi pada 1 September 2025.

Berdasarkan Hasil wawancara pada tanggal 24 Oktober, 2025 di Polresta Kupang Kota Pada bagian satuan Intelijen Keamanan (INTELKAM) Bersama Bapak Ayadin, Beliau menjelaskan bahwa: “Aksi Demo yang di lakukan oleh Mahasiswa terkait tuntutan kenaikan tunjangan DPR didepan gedung DPRD Nusa Tenggara Timur Berjalan sesuai dengan apa yang di harapkan, dimana tuntutan dari mahasiswa atau para pendemo dapat disampaikan langsung oleh gubernur walaupun sempat ada ketegangan. Selain itu Beliau juga menjelaskan bahwa pelaksanaan aksi demonstrasi diatur oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Penyampaian Pendapat di Muka Umum, yang mewajibkan penyelenggara aksi untuk mengajukan surat pemberitahuan minimal 3x24 jam sebelum kegiatan. Surat ini bertujuan agar pihak kepolisian dapat melakukan evaluasi, koordinasi, serta menyiapkan pengamanan yang

memadai. Namun, dalam praktiknya, ketentuan ini sering tidak dipatuhi oleh massa aksi, di mana pemberitahuan kerap disampaikan mendadak, bahkan beberapa jam sebelum pelaksanaan. Meski demikian, pihak kepolisian tetap menjalankan tugas pengamanan demi menjaga ketertiban dan keamanan publik.

Selain itu, struktur penanganan aksi melibatkan beberapa satuan fungsi seperti Intelkam, Binmas, Humas, dan Dalmas, yang bekerja sesuai dengan peran masing-masing. Binmas berperan sebagai negosiator antara massa dan pihak yang didemo, sedangkan Humas mendukung dokumentasi dan komunikasi publik. Apabila situasi eskalatif terjadi, pasukan Dalmas dan Brimob diterjunkan untuk menjaga fasilitas negara serta mencegah tindakan anarkis. Pihak kepolisian menegaskan bahwa demonstrasi tidak memerlukan izin, melainkan hanya pemberitahuan, dan tetap dikawal untuk menjamin keamanan semua pihak.

Dalam konteks komunikasi krisis, tantangan utama yang dihadapi Polresta Kupang Kota ialah minimnya kepatuhan terhadap prosedur hukum serta potensi miskomunikasi antara massa dan pihak yang didemo. Namun, hubungan komunikasi yang baik antara kepolisian dan kelompok mahasiswa menjadi faktor penting dalam mencegah eskalasi konflik. Melalui komunikasi yang terbuka dan koordinasi yang intensif, pelaksanaan aksi di Kupang umumnya dapat berlangsung aman dan kondusif tanpa menimbulkan kerusuhan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait “**Komunikasi Krisis Dalam Penanganan Demo Mahasiswa Tentang Kenaikan Tunjangan DPRD (Studi Kasus Penanganan Demo Mahasiswa Oleh Polresta Kupang Kota Pada Tanggal 1 September 2025)**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis kemukakan di atas, maka dapat dirumuskan masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi komunikasi krisis yang dilakukan oleh Polresta Kupang Kota dalam proses penanganan Demonstrasi Mahasiswa terkait kenaikan tunjangan DPRD Pada Tanggal 1 September 2025?
2. Apa tantangan yang dihadapi Polresta Kupang Kota dalam menjaga efektivitas komunikasi krisis pada saat pelaksanaan aksi demonstrasi mahasiswa?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan pernyataan yang merujuk pada apa yang akan diperoleh atau dicapai dari peneliti. Adapun tujuan dari peneliti ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis strategi komunikasi krisis yang diterapkan oleh Polresta Kupang Kota dalam menangani demonstrasi mahasiswa terkait kenaikan tunjangan DPRD Pada Tanggal 1 September 2025.

2. Untuk mengidentifikasi berbagai tantangan dan kendala yang dihadapi Polresta Kupang Kota dalam menjaga efektivitas komunikasi krisis saat terjadinya aksi demonstrasi mahasiswa.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan penelitian ini, diharapkan akan memberikan manfaat kepada berbagai pihak baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian ilmiah dalam bidang Ilmu Komunikasi, khususnya pada ranah komunikasi krisis dalam lembaga publik. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik bagi pengembangan teori dan model komunikasi krisis yang relevan dengan konteks lembaga pemerintahan, terutama kepolisian. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji isu serupa dengan pendekatan komunikasi organisasi atau komunikasi publik.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi Polresta Kupang Kota dan lembaga kepolisian pada umumnya dalam merumuskan strategi komunikasi krisis yang lebih efektif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi

dalam membangun pola komunikasi yang partisipatif antara aparat kepolisian dan masyarakat, khususnya kelompok mahasiswa sebagai agen perubahan sosial.

1.5 Kerangka Pemikiran, Asumsi dan Hipotesis

1.5.1 Kerangka Pemikiran

Menurut Lexi J Moleong (dalam Safarudin et al., 2023: 4) Kerangka Berpikir merupakan metode dasar untuk memahami, berpikir, mengevaluasi, dan bertindak dalam kaitannya dengan sesuatu berdasarkan visi realitas. Ini adalah pola atau model tentang bagaimana sesuatu terstruktur (bagian dan ekosistem) atau bagaimana bagian-bagian tersebut berfungsi (perilaku dalam konteks khusus atau dimensi waktu).

Menurut Miles & Huberman (dalam Heni Listiana, 2022: 149) Kerangka Berpikir didefinisikan sebagai jaringan ide atau variabel yang terorganisir secara logistik dan digunakan untuk mengarahkan penelitian. Untuk memperjelas alur ide penelitian, kerangka Berpikir ini sering digambarkan sebagai diagram atau model konseptual.

Berdasarkan pendapat dari Para Ahli di atas, kerangka berpikir dapat dipahami sebagai susunan logis dari konsep, variabel, dan hubungan antarunsur yang membentuk pola pemikiran dalam suatu penelitian. Kerangka ini tidak hanya menggambarkan bagaimana bagian-bagian penelitian saling berhubungan dan berfungsi dalam konteks tertentu, tetapi juga menjadi panduan bagi peneliti dalam menafsirkan, menilai, serta memahami realitas yang diteliti. Dengan demikian, kerangka berpikir berperan penting

sebagai landasan konseptual yang membantu memperjelas arah dan alur logika penelitian, baik secara naratif maupun dalam bentuk visual seperti model atau diagram.

Penelitian ini berjudul “Komunikasi Krisis Dalam Penanganan Demo Mahasiswa Tentang Kenaikan Tunjangan DPRD (Studi Kasus Penanganan Demo Mahasiswa Oleh Polresta Kupang Kota Pada Tanggal 1 September 2025)”. Masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Komunikasi Krisis yang digunakan oleh Polresta Kupang kota dalam Menangani Demo Mahasiswa Tentang Kenaikan Tunjangan DPR.

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan tujuan menggambarkan secara mendalam proses komunikasi krisis yang dilakukan oleh Polresta Kupang Kota selama penanganan demonstrasi. Pendekatan ini memberikan ruang bagi peneliti untuk memahami fenomena komunikasi dari perspektif aparat kepolisian dan mahasiswa sebagai pihak yang terlibat langsung.

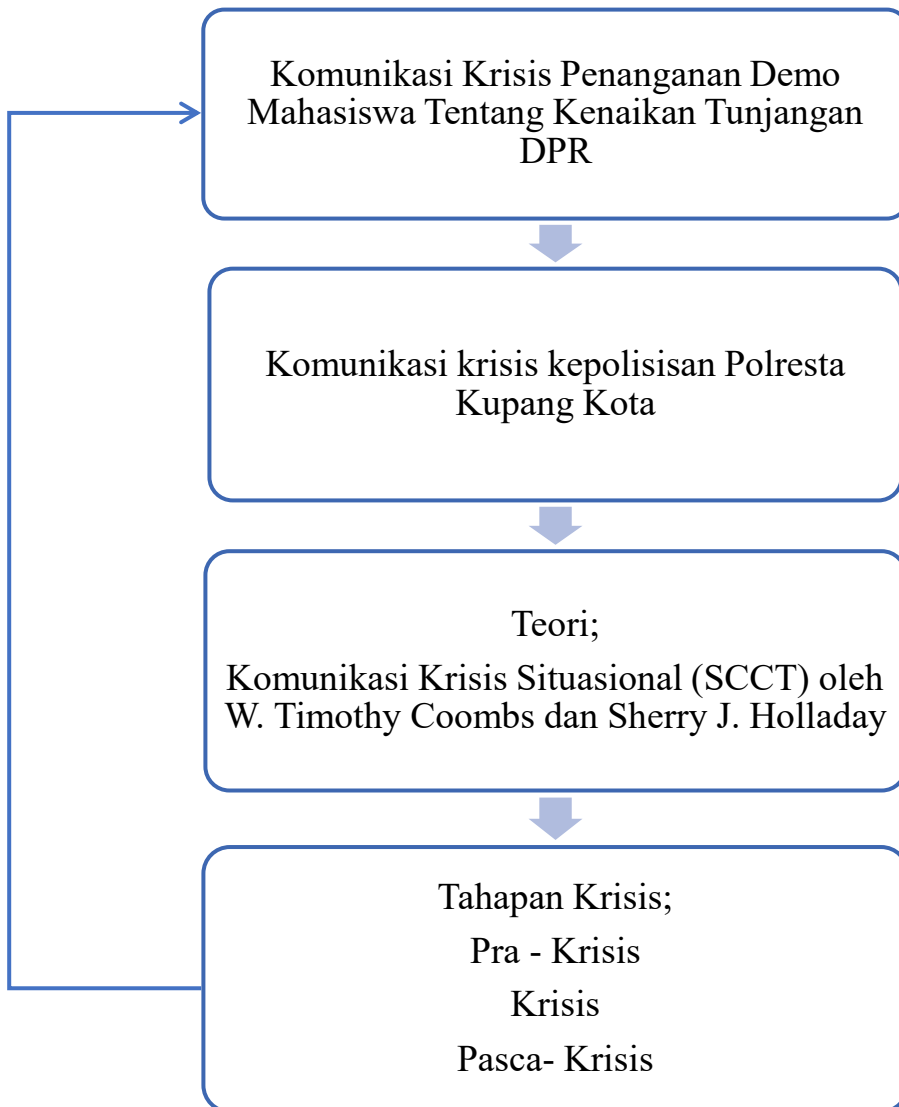
Metode yang diterapkan adalah studi kasus, dengan fokus pada peristiwa demonstrasi mahasiswa di depan Gedung DPRD Provinsi NTT. Melalui metode ini, peneliti dapat menelusuri secara sistematis tahapan komunikasi krisis, mulai dari pra-krisis, saat krisis berlangsung, hingga pasca-krisis. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi agar hasil penelitian bersifat komprehensif.

Penelitian ini menggunakan Teori Komunikasi Krisis (*Crisis Communication Theory*) dengan pendekatan khusus yang digunakan, yaitu Teori Komunikasi Krisis Situasional (SCCT) oleh W. Timothy Coombs berfungsi sebagai kerangka konseptual

mendasar. Teori Komunikasi Krisis merupakan cabang dari studi komunikasi organisasi yang membahas bagaimana suatu lembaga atau individu merespons, mengelola, dan memulihkan situasi krisis melalui strategi komunikasi yang efektif. Menurut Muhammad Saiful Aziz & Moddie Alvianto Wicaksono 2020 (dalam Hamdani et al., 2022: 16) komunikasi krisis adalah percakapan yang terjadi antara masyarakat dan pemerintah sebelum, selama, dan setelah krisis. Berdasarkan teori tersebut, komunikasi krisis terdiri atas beberapa tahapan penting, yaitu: Pra-krisis (*Pre-crisis*) tahap identifikasi potensi krisis, perencanaan strategi komunikasi, dan pembangunan hubungan dengan publik. Krisis (*Crisis Response*) tahap penanganan aktif melalui penyampaian informasi, klarifikasi, serta dialog terbuka dengan publik atau pihak terkait. Dan Pasca-krisis (*Post-crisis*) tahap evaluasi dan pemulihan reputasi melalui tindakan korektif, transparansi, dan peningkatan kepercayaan publik.

Dengan demikian, kerangka berpikir penelitian ini menekankan bahwa efektivitas komunikasi krisis oleh Polresta Kupang Kota ditentukan oleh kemampuan lembaga dalam membangun komunikasi yang cepat, terbuka, dan empatik, baik secara internal maupun eksternal. Kerangka ini menjadi landasan konseptual bagi peneliti untuk menganalisis bagaimana komunikasi krisis dapat berperan sebagai strategi utama dalam menjaga stabilitas sosial dan memperkuat citra institusi kepolisian di mata publik.

Bagan 1.1
Kerangka Pemikiran



(sumber olahan penulis, 2025)

1.5.2 Asumsi

Menurut Burhanuddin, 1997 (dalam Irfan, 2021: 293) Asumsi-asumsi yang menjadi dasar suatu penelitian dikenal sebagai asumsi dasar. Paradigma, sudut pandang, dan kerangka teoretis yang digunakan dalam penelitian semuanya secara implisit mengandung asumsi. Kebanyakan orang menganggap asumsi sebagai sesuatu yang sudah pasti, percaya bahwa asumsi tersebut sudah jelas. Postulat, atau fakta apriori yang tidak dapat diverifikasi, biasanya merupakan sumber dari asumsi.

Dengan demikian, maka asumsi dalam penelitian ini adalah ada komunikasi Krisis yang dilakukan oleh Polresta Kupang Kota dalam penanganan Demo Mahasiswa tentang kenaikan Tunjangan DPR.

1.5.3 Hipotesis

Menurut Moleong (dalam Kusumastuti & Khoiron, 2019 ; 28) Hipotesis adalah solusi jangka pendek untuk masalah yang sedang diselidiki. Karena kebenarannya masih perlu diperiksa atau dikonfirmasi menggunakan data yang dikumpulkan, hipotesis disajikan sebagai solusi sementara. Dalam penelitian ilmiah, terutama penelitian kuantitatif, hipotesis merupakan komponen penting. Alih-alih merumuskan hipotesis, hipotesis kerja diharapkan ditemukan dalam penelitian kualitatif.

Dengan demikian, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah bahwa komunikasi krisis yang diterapkan oleh Polresta Kupang Kota dalam proses penanganan Demo Mahasiswa Tentang Kenaikan Tunjangan DPR dapat dijalankan

pada tahap pra-krisis, krisis, dan pasca-krisis Menurut Teori Komunikasi Krisis Situasional (SCCT) oleh W. Timothy Coombs dan Sherry J. Holladay.